

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, Yustisia, 2019.
- Agus Sugiono, “Analisa Menambah Surat Gugat dapat dilakukan Sepanjang tidak Merubah dan Menambah Kejadian Materiil Berdasarkan Pasal 127 RV (Perkara No. 79/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)”, Jurnal Hukum dan Demokrasi Vol. 23.
- Andi Sugirman, “Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila Melalui Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Ekspose Vol.23.
- Anita Marlin, “Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)” Diponegoro Law Journal Vol.6.
- Askari Razak, “Sistem Proporsionalitas Terbuka sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi dan Implikasi”, Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum Vol.6.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Bawaslu Tangabi 137 Permohonan Sengketa Pemilihan Hingga November 2024”, Bawaslu, Internet, diakses 8 Maret 2026. [Bagja: Bawaslu Tangani 137 Permohonan Sengketa Pemilihan Hingga November 2024 | Badan Pengawas Pemilihan Umum](#)

Bernard Panjaitan, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”, *Ilmiah Advokasi* Vol. 03, No. 03 (2015):1.

Bernat Panjaitan, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Tun) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*.

Brian Bush Rumokoy, “Tinjauan Hukum Tentang Sengketa Pemilihan Umum Di Sulawesi Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *Lex Crimen* Vol.13.

Dahlia Ririyanti Siregar, “Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara”, *Lex Privatum* Vol. 3.

Dita Aulia, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan di Lingkungan Masyarakat”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol.45.

Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan” *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.3.

Fadhlin Ade Candra, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Edu Society*, 2021.

Fitri Ayuningtyas, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Amnesi* Vol 5, hlm. 141.

Indra Rahmatullah, “Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila”, *Adalah Buletin Hukum*, hlm.40.

- Jamil, “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukum”, *Perspektif* Vol. 25.
- Lia Ananda, “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Berperan Mengontrol Administrasi Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*.
- Mico Kurnia Amus, “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Dalam Sengketa Pertanahan Ditinjau Dari Unsur KTUN”, *Jurnal Al-Wasath*.
- Muhammad Hasyim, “Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila”, *Ius Quia Iustum* Vol. 3.
- Olivia Septi Rahayu, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Suatu Gugatan berdasarkan Kompetensi Relatif”, *AL-Zayn* Vol.4.
- Ridwan, “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi”, *Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 25.
- Samsul Abdul, “Kapasitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Umum”, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 6.
- Samsun Ninilouw, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* Vol.6.
- Tubagus Muhammad, “Konsepsi Negara Hukum Pancasila dan Implementasinya di Indonesia”, *Pranata Hukum*.

LAMPIRAN